

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat paling kecil yang biasanya terdiri atas ayah, ibu dan anak. Membangun suatu rumah tangga melalui perkawinan merupakan salah satu hak privasi setiap warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi, yakni pada Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijabarkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan tersebut menjelaskan bahwa tujuan perkawinan yang menjadi dambaan setiap pasangan adalah membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Rumah tangga yang bahagia ditandai oleh adanya rasa saling mengasihi dan mencintai sesama anggota keluarga, adanya kerukunan antar anggota keluarga, dan adanya kehangatan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian, rumah tangga yang kekal ditandai dengan adanya keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga yang akan memperkuat ikatan perkawinan sehingga tidak terjadi pertengkaran, perselisihan, perpecahan, ataupun kekerasan dalam suatu rumah tangga.

Terwujudnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga sangat tergantung pada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang terutama berkaitan dengan kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Akibat buruk yang bisa timbul dari ketidakmampuan mengontrol dan mengendalikan diri adalah perilaku negatif berupa amarah dan pertengkaran yang dapat berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selama ini perempuan (istri) lah yang seringkali harus menanggung penderitaan akibat kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Mannheim (Aroma Elmina Martha, 2012: 52-53) bahwa perempuan cenderung lebih sering menjadi korban kekerasan daripada laki-laki atau yang disebut dengan istilah *latent victim*.

Selain perilaku negatif, beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan pada lingkup rumah tangga diantaranya masih adanya budaya patriarki, interpretasi agama yang bias gender, serta pandangan gender atau relasi gender yang tidak seimbang seperti subordinasi (BPPM DIY, 2009: 53). Namun tidak menutup kemungkinan KDRT terjadi karena disebabkan oleh masalah keuangan, kecemburuan salah satu pihak, masalah anak, campur tangan pihak ketiga, masalah masa lalu, atau kesalahpahaman antar suami dan istri (Moerti Hadiati Soeroso, 2011: 77-80).

Pada kenyataannya masih ada perempuan korban KDRT yang berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga. Pola pikir yang menganggap bahwa apa yang terjadi dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi seringkali menjadikan korban enggan mengadukan kekerasan yang telah menyimpannya (Rena Yulia, 2013: 4). Korban merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Terlebih lagi ada pemikiran bahwa apabila melaporkan kasusnya ke kepolisian, pelapor dapat menjadi korban ganda yang berarti korban harus selalu mengulang-ulang perbuatan yang tidak mengenakan yang pernah menimpa dirinya, dimulai di Kepolisian sampai dengan di sidang pengadilan sehingga cenderung akan menambah penderitaan/tekanan pada korban (Moerti Hadiati Soeroso, 2011: 133).

Dikeluarkannya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menjadikan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga bukan lagi sekedar persoalan pribadi antara suami dan istri dalam rumah tangga saja, tetapi sudah masuk tindak pidana yang dapat dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dengan adanya payung hukum tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penindakan pelaku, pencegahan sekaligus memberikan perlindungan kepada korban KDRT tanpa mengurangi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam hal penindakan tindak KDRT kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT. Pernyataan ini berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang menyatakan tugas pokok kepolisian diantaranya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun telah dilakukan upaya pencegahan maupun penindakan kasus KDRT oleh polisi, tetapi faktanya tindak KDRT di Indonesia masih terus terjadi sehingga mengakibatkan perempuan mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Misalnya saja di wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terjadinya permasalahan rumah tangga yang berujung pada kekerasan cenderung mengalami peningkatan. Hal ini didukung dengan data Direktorat Reserse Kriminal (Dit Reskrim) Polda DIY dan Polres/Polresta Jajarannya yang mencatat jumlah kasus KDRT yang dilaporkan pada tahun 2012 sampai 2016. Pada tahun 2012 terdapat 88 laporan dan yang selesai 73 kasus, tahun 2013 jumlah laporan sedikit meningkat menjadi 114 laporan dan yang selesai 74 kasus, tahun 2014 jumlah laporan meningkat menjadi 166 laporan dan yang selesai 130 kasus, tahun 2015 jumlah laporan sedikit menurun menjadi 162 laporan dan yang selesai 96 kasus, selanjutnya tahun 2016 kembali meningkat menjadi 180 kasus dan yang selesai 110 kasus (Sekar Langit, 2017, diakses dari <http://www.harianjogja.com/> pada tanggal 8 Mei 2017).

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus KDRT yang ditangani kepolisian di Provinsi DIY cukup tinggi dan setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Meskipun pada tahun 2015 jumlah laporan KDRT yang diterima Polda DIY mengalami penurunan, tetapi angka penurunannya sangat kecil yakni dari 166 kasus menjadi 162 kasus. Kemudian jika dijumlahkan dari tahun 2012

sampai 2016 maka dari 710 laporan kasus KDRT sejumlah 483 kasus telah selesai dan terdapat 227 kasus yang belum selesai atau masih dalam proses. Hal tersebut dapat berarti bahwa penanganan dan penyelesaian kasus KDRT di Polda DIY maupun jajarannya masih belum optimal dan bisa diasumsikan bahwa kepolisian menghadapi hambatan atau kendala dalam penyelesaiannya.

Hasil penelitian tentang hambatan penanggulangan KDRT yang dilakukan oleh Wahyu Sri Handayani (2013) mengemukakan bahwa hambatan penanggulangan KDRT di wilayah Polres Klaten meliputi banyaknya pencabutan laporan pada kekerasan fisik yang merupakan delik aduan sesuai Pasal 44 ayat (4) UU Penghapusan KDRT, adanya tersangka yang pergi, kesulitan dalam pembuktian, dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penghapusan KDRT ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ardian (2013) mengenai penegakan hukum tindak pidana KDRT. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa salah satu kendala penegakan hukum KDRT oleh Polda DIY adalah korban merasa malu diketahui tetangga dan takut kepada suami apabila melaporkan kekerasan yang dialaminya ke kepolisian. Hasil penelitian tersebut semakin memperkuat anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bagaikan fenomena gunung es di mana kasus KDRT yang terungkap hanya sebagian atau di permukaannya saja. Sebab realitanya sebagian perempuan yang menjadi korban kekerasan enggan atau tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal

tersebut dapat pula berarti bahwa terdapat korban KDRT yang belum terlindungi meskipun sudah ada UU Penghapusan KDRT.

Pemberian perlindungan merupakan bagian dari tugas pokok polisi selain bertugas menegakkan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Tugas pokok polisi dalam hal perlindungan ini sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa salah satu tugas polisi adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Pelaksanaan perlindungan terhadap korban KDRT oleh polisi juga ditegaskan dalam Pasal 10 huruf a UU PKDRT menyatakan bahwa “korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.” Berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penghapusan KDRT yang menjadikan masyarakat enggan melapor maka UU PKDRT menentukan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan edukasi dan informasi tentang KDRT sebagai bentuk perlindungan terhadap korban KDRT. Sementara polisi sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan perlindungan terhadap korban KDRT diharuskan menjamin keselamatan korban melalui permintaan surat penetapan perintah perlindungan dan kerjasama dengan instansi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UU PKDRT.

Perlindungan terhadap korban KDRT dilaksanakan oleh polisi bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang dibentuk berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan

dan Anak (Unit PPA). Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Kemudian pelaksanaannya juga mengacu pada Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus yang menyebutkan tugas Unit PPA dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak pidana.

Berbicara tentang tugas Unit PPA dalam melaksanakan perlindungan, dapat diuraikan salah satu penelitian terkait sebelumnya sebagai perbandingan. Penelitian Desi Kurnianingsih (2014) tentang perlindungan anak korban tindak pidana kesusilaan di Unit PPA Polres Sleman memberikan hasil bahwa perlindungan terhadap anak dilakukan sesuai UU Perlindungan Anak, yakni dengan melaksanakan rehabilitasi, perlindungan dari pemberitaan media massa untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi anak korban baik fisik, mental maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas informasi mengenai perkembangan perkara. Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian tersebut sebab penelitian sebelumnya berangkat dari dampak yang timbul pada anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan. Sedangkan penelitian ini berangkat dari permasalahan masih terdapat korban KDRT yang mengalami kekerasan berulang setelah melaporkan kasusnya ke Unit PPA Polresta Yogyakarta sehingga korban belum sepenuhnya aman di mana permasalahan ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Sebagai salah satu wilayah di Provinsi DIY, Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit dibanding Kabupaten lainnya.

Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada akhir Desember tahun 2016 sebanyak 412.331 jiwa (kependudukan.jogjapro.go.id). Walaupun jumlah penduduknya paling sedikit, tetapi tindak pidana di Kota Yogyakarta masih banyak terjadi, termasuk tindak KDRT. Sementara itu dalam Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010 disebutkan bahwa jumlah personil polisi untuk daerah dengan status Kota lebih banyak daripada Kabupaten. Hal tersebut dapat berarti bahwa penanganan kasus KDRT di Yogyakarta yang merupakan tugas dari Unit PPA Polresta Yogyakarta yang berkedudukan di bawah Kasat Reskrim Polresta masih bermasalah atau kurang maksimal. Terkait dengan penanganan kasus KDRT, Unit PPA Polresta Yogyakarta telah berupaya melakukan tindakan pencegahan kasus KDRT sebagai upaya perlindungan korban KDRT, tetapi tetap saja setiap tahunnya masih terdapat puluhan orang (kebanyakan perempuan) yang menjadi korban tindak KDRT di Kota Yogyakarta. Berikut data jumlah kasus KDRT yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 1. Data Jumlah Kasus KDRT yang Dilaporkan ke Polresta Yogyakarta dan Polsekta Jajaran Tahun 2014-2016

No.	Bulan	Jumlah Kasus KDRT/Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Januari	3	3	5
2.	Februari	4	2	-
3.	Maret	3	1	1
4.	April	1	1	4
5.	Mei	2	5	1
6.	Juni	1	2	3
7.	Juli	5	6	1
8.	Agustus	4	2	3
9.	September	2	2	1
10.	Oktober	5	2	2
11.	November	3	1	3
12.	Desember	4	6	1
Jumlah		37 kasus	33 kasus	25 kasus

Sumber: Unit PPA Polresta Yogyakarta, diambil 3 Maret 2017

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Unit PPA Polresta Yogyakarta, dari 25 kasus KDRT yang terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2016, ada 16 kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh Polresta dan 9 kasus lainnya dilaporkan dan ditangani oleh Polsekta Jajaran. Data di atas menunjukkan bahwa meskipun selama 3 (tiga) tahun terakhir kasus KDRT di Kota Yogyakarta tidak mengalami kenaikan, tetapi penurunannya juga tidak terlalu signifikan. Artinya selama 3 tahun terakhir ini masih terdapat puluhan orang yang menjadi korban KDRT. Jumlah tersebut masih lebih banyak jika dibandingkan dengan data kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo yakni hanya terjadi 5 dan 13 kasus KDRT pada tahun 2015 dan 2016 yang ditangani Polres Kulonprogo (Bhima Bharata, 2017, diakses dari <http://kulonprogo.sorot.co/> pada 4 Juni 2017). Padahal jumlah penduduk Kabupaten Kulonprogo sendiri sedikit lebih banyak dari Kota Yogyakarta yakni 445.293 jiwa pada akhir Desember 2016 (kependudukan.jogjapro.go.id). Dengan demikian berarti pencegahan kasus KDRT yang merupakan salah satu lingkup perlindungan dari tindak KDRT di Yogyakarta dapat dikatakan masih belum terlalu berpengaruh untuk mengatasi persoalan kasus KDRT. Pernyataan ini juga didukung oleh data berikut.

Tabel 2. Data Rekapitulasi Kasus KDRT yang ditangani Unit PPA Polresta Yogyakarta Tahun 2016

No.	Laporan Polisi	Tgl Lap/TKP	Pela-por	Ter-lapor	Korban	Bentuk KDRT	Pasal	Akibat Kekerasan
1.	LP/06-B/I/2016/DIY/SPKT	6 Januari 2016/Um-bulharjo	VS (25 th)	J (28 th)	VS (25) Istri terlapor	Kekerasan fisik	Pasal 44 (1) UU PKDRT	Luka lecet, lebam dan memar bagian leher, tangan kiri dan perut
2.	LP/29-B/I/2016/DIY/SPKT	21 Januari 2016/Jetis	E (34)	NS (34)	E (34) Istri terlapor	Kekerasan fisik dan psikis	Pasal 44 (1) UU PKDRT	Luka memar bagian leher, tangan kanan dan perut, dan tekanan psikis trauma
3.	LP/32-B/I/2016/DIY/SPKT	25 Januari 2016/Um-bulharjo	NC (23)	FM (29)	NC (23) Istri dan anak	Kekerasan psikis dan penelantaran	Pasal 45 (1) dan 49 UU	Mengalami tekanan psikis/kejiwaan

					terlapor		PKDRT	
4.	LP/41-B/I/2016/SPKT	29 Januari 2016/ Tegalrejo	DS (21)	D (27)	DS (21), pr, adik terlapor	Kekerasan fisik	Pasal 44 (4) UU PKDRT	Luka memar pada bagian kepala
5.	LP/168-B/IV/2016/DIY/RESTA YK	13 April 2016/ Kotagede	FN (28)	DK (28)	FN (28) Istri terlapor	Kekerasan fisik	Pasal 44 (1) UU PKDRT	Luka pada jidat, lecet, memar pada pipi kiri dan kepala hematum
6.	LP/174-B/IV/2016/DIY/SPKT	15 April 2016/ Mantriye- ron	AAS (37)	YK (40)	AAS (37) Istri dan anak terlapor	Penelantaran	Pasal 49 UU PKDRT	Istri dan anak tidak diberi nafkah selama kurang lebih 6 bulan
7.	LP/200-B/V/2016/DIY/RESTA YK	7 Mei 2016/Mer- gangsari	ER (26)	J (38)	ER (26) Istri terlapor	Kekerasan fisik	Pasal 44 (4) UU PKDRT	Luka memar pada paha kiri dan kepala, trauma
8.	LP/255-B/VI/2016/DIY/RESTA YK	6 Juni 2016/Mer- gangsari	F (33)	EA (38)	F (33) Istri terlapor	Kekerasan fisik	Pasal 44 (1) UU PKDRT	Luka memar pada kepala dan tangan kiri
9.	LP/293-B/VII/2016/SPKT	2 Juli 2016/Gon- dokusum	JW (32)	BA (35)	JW (32) Istri terlapor	Kekerasan fisik	Pasal 44 (4) UU PKDRT	Luka memar di kaki
10.	LP/351-B/VIII/2016/SPKT	8 Agustus 2016/ Wirobra-jan	YP (40)	VKP (35)	YP (40) suami terlapor	Kekerasan fisik	Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT	Luka memar di pipi dan dagu
11.	STBL/397-B/IX/2016/DIY/ RESTA YK	19 September 2016/Gedon- gengen	NN (36)	JHPS (40)	NN (36) Istri terlapor	Kekerasan fisik	Pasal 44 (1) UU PKDRT	Luka memar dan nyeri di kepala
12.	STBL/412-B/X/2016/DIY/RESTA YK	1 Oktober 2016/ Ngampilan	NC (25)	AAM (26)	NC (25) Istri terlapor	Kekerasan fisik	Pasal 44 (1) UU PKDRT	Luka memar pada tangan kanan dan kaki kiri, kepala pusing, bibir luka, trauma
13.	LP/439-B/XI/2016/DIY/SPKT	3 November 2016/Man- triye-ron	F (34)	TGM (31)	F (34) Istri terlapor	Kekerasan fisik	Pasal 44 (4) UU PKDRT	Luka memar pada wajah dan lebam di kepala
14.	LP/455-B/XI/2016/DIY/SPKT	23 November 2016/ Gondoku- suman	DLP (21)	FN (24)	DLP (21) Istri terlapor	Kekerasan fisik	Pasal 44 (1) UU PKDRT	Pusing dan luka pada telinga
15.	LP/462-B/XI/2016/DIY/SPKT	26 November 2016/ Mantriye- ron	SS (59)	D (67)	SS (59) Istri terlapor	Kekerasan fisik	Pasal 44 UU PKDRT	Bengkak dan memar pada pipi kanan dan pelipis kanan, pusing
16.	LP/470-B/XII/2016/SPKT	5 Desember 2016/ Gondoku- suman	TP (42)	FN (24)	DLP (21) Istri terlapor	Kekerasan fisik	Pasal 44 ayat (2) dan (1) UU PKDRT	Luka lebam atau bengkak pada mata kanan dan bibir, trauma

Sumber: Unit PPA Polresta Yogyakarta, diambil 8 Maret 2017

Tabel tersebut menunjukkan bahwa yang sering menjadi korban KDRT adalah perempuan. Jenis kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan fisik, di samping itu juga terjadi kekerasan psikis dan penelantaran. Akibat yang dialami korban kekerasan tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan psikis dan ekonomi. Oleh karena itu sudah seharusnya korban KDRT tersebut memperoleh perlindungan dari polisi sebagai salah satu lembaga pelindung masyarakat. Namun, pada kenyataannya perlindungan korban KDRT di Polresta Yogyakarta belum sepenuhnya memberikan rasa aman kepada korban. Hal ini ditunjukkan oleh salah satu kasus KDRT dengan korban inisial “DLP” yang kembali dianiaya suaminya dalam waktu kurang dari satu bulan setelah korban melaporkan kasusnya kepada Unit PPA Polresta Yogyakarta. Pada tanggal 23 November 2016 korban melaporkan KDRT yang dialaminya kepada polisi, tetapi kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pada tanggal 5 Desember 2016 pelaku kembali mengulang perbuatannya. Peristiwa ini dapat dibaca pada cuplikan berita berikut ini.

Harianjogja.com, JOGJA – Seorang suami bernama Fauzi Nugroho, 24, berkali-kali menganiaya istrinya, DLP (21). Meski sempat berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun sang istri mulai tak kerasan dengan sikap kasar suami hingga merelakan kasus itu dibawa ke ranah hukum. Korban sebelumnya juga pernah melaporkan suaminya dalam kasus serupa namun diselesaikan secara kekeluargaan.

Pasangan ini tinggal di GKV/1076 Terban, Gondokusuman, Kota Jogja. Dari hasil penyidikan, penganiayaan yang dilakukan tersangka terhadap korban sudah berkali-kali. Pada 2014 silam, tersangka memukuli korban kemudian melapor ke Mapolresta Jogja.

Hal yang sama juga dilakukan oleh tersangka pada 23 November 2016. Tetapi kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan. “Terakhir kemarin itu sampai menyebabkan korban harus dirawat di rumah sakit,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Jogja (Sunartono, 2016, diakses dari <http://harianjogja.com/> pada 4 April 2017).

Walaupun hanya satu korban yang berulang kali mengalami kekerasan tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan ukuran mengingat KDRT masih dianggap sebagai masalah internal sehingga korban merasa malu dan takut untuk melapor sebagaimana diungkapkan dalam penelitian sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan perintah perlindungan yang menjadi salah satu tugas polisi, maka berulangnya tindak kekerasan tersebut dapat terjadi karena tidak adanya suatu hal yang menjamin keselamatan korban. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Unit PPA Polresta Yogyakarta, selama ini Unit PPA belum pernah meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan sehingga dari sekian banyak korban KDRT tidak ada korban yang memperoleh perintah perlindungan. Sementara Pasal 16 ayat (3) UU PKDRT diantaranya menyatakan bahwa dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Padahal dengan perintah perlindungan tersebut keselamatan korban dapat lebih terjamin karena apabila pelaku melanggar perintah perlindungan, misalnya melakukan intimidasi atau mengulangi perbuatannya maka aparat kepolisian dapat menangkap pelaku KDRT yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan. Kemudian dalam waktu 1 x 24 jam kepolisian dapat melakukan penahanan disertai surat perintah penahanan dan tidak dapat dilakukan penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 35 UU Penghapusan KDRT.

Hal tersebut menjadi permasalahan, sebab berulangnya tindak KDRT menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT yang mengalami

penderitaan fisik, psikis maupun penelantaran di Unit PPA Polresta Yogyakarta belum sepenuhnya memberikan rasa aman kepada korban. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa dibalik belum terlindunginya korban sepenuhnya tersebut disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang menjadi kendala sehingga menyulitkan Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan korban KDRT. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud untuk mengkaji perlindungan korban KDRT dengan mengambil judul Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta (Unit PPA Polresta Yogyakarta) dalam Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut:

1. Kasus KDRT yang terjadi di Provinsi DIY cukup tinggi dan cenderung mengalami kenaikan.
2. Penyelesaian kasus KDRT di kepolisian belum optimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kepolisian.
3. Masih terdapat puluhan orang yang kebanyakan perempuan di Kota Yogyakarta yang menjadi korban KDRT setiap tahunnya.
4. Perlindungan terhadap korban KDRT di Unit PPA Polresta Yogyakarta belum sepenuhnya memberikan rasa aman dan keselamatan bagi korban KDRT.
5. Adanya kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam melindungi korban KDRT sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang ada berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini bertujuan agar peneliti dapat lebih fokus mengkaji secara mendalam suatu masalah penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan sampai pada perlindungan korban KDRT di Unit PPA Polresta Yogyakarta dan kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan korban KDRT sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban KDRT?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban KDRT?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Yogyakarta untuk mengatasi kendala dalam perlindungan perempuan korban KDRT?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peranan Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban KDRT.

2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban KDRT.
3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Yogyakarta untuk mengatasi kendala dalam perlindungan perempuan korban KDRT.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat bagi jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum yakni dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengalaman untuk menerapkan teori mengenai hukum yang telah diperoleh selama proses perkuliahan sehingga diharapkan peneliti mampu mengkaji dan menganalisis berbagai hubungan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta dapat menambah pengetahuan peneliti.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi instansi kepolisian, diantaranya adalah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dan

mengoptimalkan kerjasama dengan instansi lainnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT.

c. Bagi Pembaca

Melalui penelitian ini, pembaca dapat memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai perlindungan terhadap perempuan korban KDRT oleh instansi kepolisian.

G. Batasan Istilah

Dalam rangka mencegah timbulnya perluasan makna yang dapat berakibat pada kesimpangsiuran maupun multitafsir oleh para pembaca, maka peneliti perlu memberikan batasan istilah pada judul penelitian. Istilah-istilah yang dibatasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI (Depdiknas, 2008: 1051) peranan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Soerjono Soekanto (2013: 212-213) peranan atau *role* merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti orang tersebut menjalankan suatu peranan. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Yogyakarta sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang telah ditentukan dalam rangka melaksanakan pemberian perlindungan kepada perempuan dari kekerasan dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Yogyakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu unit yang kedudukannya berada di bawah Sat Reskrim Polresta Yogyakarta yang diisi oleh beberapa personil polisi wanita dan laki-laki yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Perlindungan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan dalam penelitian ini dibatasi sampai pada sikap dan tindakan yang dilakukan Unit PPA Polresta Yogyakarta sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya untuk memberikan rasa aman dan keselamatan kepada perempuan dari kekerasan dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Korban

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan KDRT) yang dimaksud korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Korban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang perempuan yang terikat dalam hubungan perkawinan (istri) yang mengalami penderitaan fisik, psikis, pengabaian hak-haknya, dan penelantaran sebagai akibat perbuatan orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya.

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 1 angka 1 UU PKDRT menyebutkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam penelitian ini yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap tindakan atau perbuatan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga terhadap seorang perempuan yang terikat dalam hubungan perkawinan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran.